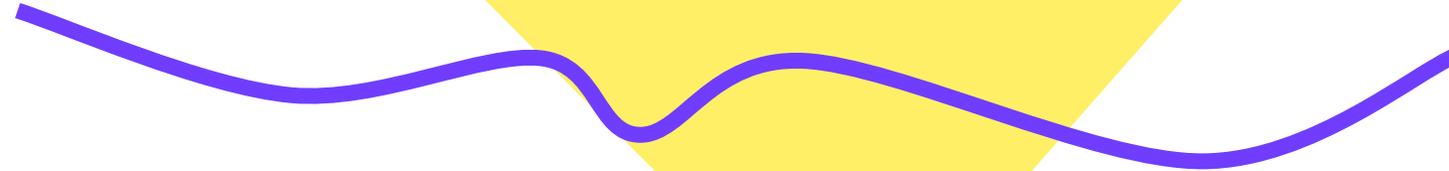




Analisis Rasio Kinerja
Keuangan Daerah
Kota Batu



BAB I

A. Latar Belakang

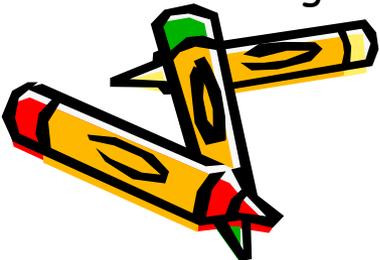


- Sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah kota diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.
- Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam APBD mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.
- Salah satu alat untuk mengukur dan menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis terhadap kemampuan daerah untuk bisa mandiri dengan menggunakan alat ukur analisis rasio keuangan APBD daerah yang telah dilaksanakan.
- Dalam kaitannya dengan pembiayaan sektor publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maka peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 telah memasyarakat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya disusun dengan pendekatan kinerja



Lanjutan

- Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas antara lain yakni menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Dasar sistem pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku maka dalam laporan pertanggungjawaban keuangan daerah disampaikan oleh kepala Daerah (Walikota) pada setiap akhir tahun anggaran setidaknya-tidaknya merupakan Laporan Keuangan Daerah (LDK) dalam bentuk:
 1. Laporan realisasi Anggaran
 2. Laporan arus kas
 3. Neraca daerah
 4. Catatan atas laporan keuangan
- Laporan keuangan daerah sebagaimana di maksud merupakan tolok ukur kinerja keuangan daerah guna melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

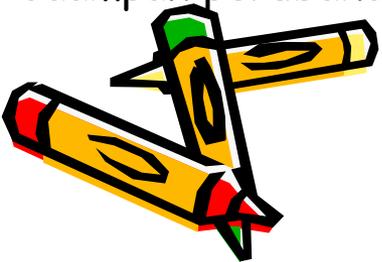


Lanjutan



Tingkat kemandirian Pemerintah Kota Batu mencapai derajat desentralisasi fiskal posisi rata-rata dibandingkan dengan kota lain, namun jika dilihat dari nilai pertumbuhan untuk tahun 2004-2006, rasio kemandirian mengalami penurunan yang berarti Pemerintah Kota Batu cenderung memiliki ketergantungan finansial yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap total APBD yang masih relatif kecil dan sumber pembiayaan utama masih bersumber dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat. Dari sisi penggunaan anggaran atau belanja daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Batu, selama 3 tahun anggaran yang di teliti, mengalami kenaikan beban anggaran di karenakan bertambahnya jumlah pegawai yang cukup besar dan dilihat dari naiknya rasio belanja oprasional yang meruakan beban tetap yang terus meningkat. Tetapi, Pemerintah Kota Batu memiliki kesempatan dan peluang untuk menggunakan dana pinjaman guna membiayai kegiatan pembangunan hal ini tercermin dari DSCR jauh di tas ketentuan PP Nomor 107 yang disyaratkan sebesar 2,5 kali, hasil penelitian di kota batu memiliki DSCR rata-rata dalam periode di teliti 2004-2006 adalah sebesar 51,89%.

Demikian juga mengingat Kota batu telah berjalan 2 Tahun Kepemimpinan Walikota baru yaitu Edi Rumpoko kemampuan keuangan daerah menjadi sangat penting untuk merefleksikan dari apakah sejak pergantian kepemimpinan Walikota mempunyai dampak perubahan yang baik dari APBD pemerintah Kota Batu.



C.Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Batu pada tahun anggaran 2006 sampai 2009.



D. Batasan Masalah

■ Mengetahui tingkat kinerja keuangan daerah Kota Batu yang bersumber dari APBD tahun 2006 sampai 2009



BAB II

A. Penelitian Terdahulu

Maharani (2006), hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Kota Batu. Jenis penelitian studi kasus dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dan catatan Pemerintah Daerah Kota Batu, Menyimpulkan bahwa kinerja Tingkat kemandirian pemkot batu mecapai derajat desentralisasi fiskal posisi rata-rata dibandingkan dengan kota lain, namun jika dilihat dari nilai pertumbuhan untuk tahun 2004–2006, rasio kemandirian mengalami penurunan yang berarti Pemerintah Kota Batu cenderung memiliki ketergantungan finansial yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap total APBD yang masih relatif kecil dan sumber pembiayaan utama masih bersumber dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat.

Dari sisi penggunaan anggaran atau belanja daerah yang dilakukan Pemkot Batu, selama 3 tahun anggaran yang di teliti, mengalami kenaikan beban anggaran di karenakan bertambahnya jumlah pegawai yang cukup besar dan dilihat dari naiknya rasio belanja oprasional yang meruakan beban tetap yang terus meningkat.

Pemerintah kota batu memiliki kesempatan dan peluang untuk menggunakan dana pinjaman guna membiayai kegiatan pembangunan hal ini tercermin dari DSCR jauh di atas ketentuan PP Nomor 107 yang sisyaratkan sebesar 2,5 kali, hasil penelitian di kota batu memiliki DSCR rata-rata dalam periode di teliti 2004–2006 adalah sebesar 51,89

B. Landasan Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

2. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang keuangan pemerintah daerah.
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standart akuntansi pemerintah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Dana Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang pelaporan Keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

lanjutan

3. Keuangan Daerah.

4. Pendapatan Daerah.

5. Pendapatan Asli Daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

b) Retribusi

c) Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan

a) Bagi Hasil Pajak

b) Bagi Hasil Bukan Pajak

c) Dana Alokasi Umum

d) Dana Alokasi Khusus

e) Dana Darurat

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

lanjutan

6. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Definisi Kinerja
- b. Penilaian Kinerja
- c. Tujuan Penilaian Kinerja
- d. Indikator Penilaian Kinerja

7. Pengertian Analisis Rasio Keuangan Pada APBD

- a. Analisis keuangan
- b. Analisis keuangan pada APBD
- c. Rasio yang bersumber dari APBD
 - a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan pinjaman}}$$

lanjutan

b) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Penerimaan PAD

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \\ \text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Penerimaan PAD}}$$

c) Rasio Aktifitas

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (pokok angsuran + bunga + biaya pinjaman)}} \times 100\%$$

lanjutan

d) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{RPPAD } X_n - X_{n-1}}{\text{RPPAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

e) Rasio Kontribusi

$$\text{Rasio kontribusi} = \frac{\text{Jumlah pajak dan retribusi daerah}}{\text{Jumlah PAD (tahun yang sama)}}$$

BAB III

Metode Penelitian

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada bagian keuangan Pemerintah Kota Batu Jl.Panglima sudirman Kota Batu.

B. Jenis Penelitian

Penelitian Bersifat studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dilakukan langsung objek penelitian bagian keuangan Pemerintah Kota Batu.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bagian keuangan Pemerintah Kota Batu tahun 2006-2009 yang telah diolah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan daerah.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data atau keterangan dari pemerintah daerah berupa Laporan Keuangan Daerah Kota Batu tahun 2006-2009 yang telah diolah oleh bagian keuangan Pemerintah Kota Batu.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dalam pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

Pendapatan Asli Daerah

Rasio Kemandirian = _____

Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan pinjaman

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Realisasi Penerimaan PAD

Rasio Efektifitas = _____

Target Penerimaan Pad Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai Pemda.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD

Rasio Efisiensi = _____

Penerimaan PAD

Kinerja Pemda dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100%. Semakin rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

3.Rasio Aktifitas

Rasio aktifitas ini menggambarkan atau mengukur aktivitas dan yang digunakan dalam kegiatan di daerah. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) merupakan perbandingan antara jumlah PAD, bagian Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan pemjumlahan angsuran pokok, bunga, biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (pokok angsuran} + \text{bunga} + \text{biaya pinjaman)}} \times 100\%$$

Dimana:

- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- BD = Bagian Daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- BW = Belanja Wajib

4.Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan ini mengukur seberapa besar tingkat kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangungn

A. Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{RPPAD } X_n - X_{n-1}}{\text{RPPAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana

- RPPAD $X_n - X_{n-1}$ = Realisasi penerimaan Pendapatan Asli daerah tahun yag dihitung di kurangi tahun sebelumnya.
- RPPAD X_{n-1} = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya

5.Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam PAD terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya dalam persentas, dapat dihitung dari realisasi jumlah pajak / retribusi daerah dibandingkan dengan jumlah PAD pada tahun anggaran yang sama.

Jumlah pajak dan retribusi daerah

Rasio kontribusi = $\frac{\text{Jumlah pajak dan retribusi daerah}}{\text{Jumlah PAD (tahun yang sama)}}$

Hasil rasio keuangan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk tolak ukur dalam:

- a.Mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
 - b.Melihat pertumbuhan / perkembangan perolehan pendapatan yang terjadi selama periode waktu tertentu.
- Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

BAB IV

Pembahasan

A. Tinjauan Umum Daerah Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

Apel merupakan produk khas yang menjadi andalan daerah yang datarannya berada di ketinggian tak kurang dari 600 meter di atas permukaan laut serta dikelilingi banyak gunung (Gunung Panderman, Gunung Banyak, Gunung Welirang, dan Gunung Bokong). Dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Temperatur rata-rata Kota Batu 21,5°C, dengan temperatur tertinggi 27,2°C dan terendah 14,9°C.

2. Sekilas Wilayah dan Kependudukan

Kota Batu merupakan salah satu bagian dari wilayah Jawa Timur yang secara Geografis Kota Batu terletak pada posisi antara :

- a. – 7,44deg 55,11" s/d 8,26deg 35,45" Lintang Selatan
- b. – 122,17deg 10,90" s/d 122,57deg 00,00" Bujur Timur

Kota dengan Luas 202,800 Km² atau sama dengan 20,280 ha ini, berbatasan dengan :

- * Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir
- * Sebelah Barat : Kecamatan Pujon
- * Sebelah Timur : Kecamatan Karang plosa dan Kecamatan Dau
- * Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen

lanjutan

3. Kondisi Perekonomian

Distribusi kegiatan perekonomian kota Batu antara lain : Jasa–jasa 14% Perdagangan, Hotel, dan Restoran 44%. Pertambangan dan Penggalian 1% Pertanian 14% Listrik, Gas dan Air Bersih 2%. Bangunan 2%, Industri Pengolahan 14%,Keuangan 4%, Pengangkutan dan Komunikasi 5%. Pemandian air dingin dan panas, agrowisata, sehingga wisata dirgantara (paralayang) yang tersebar di tiga kecamatan di Batu.

4. Struktur Organisasi Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batu

Berdasarkan struktur bagian keuangan Pemerintah Kota Batu membawahi 3 sub bagian, yaitu:

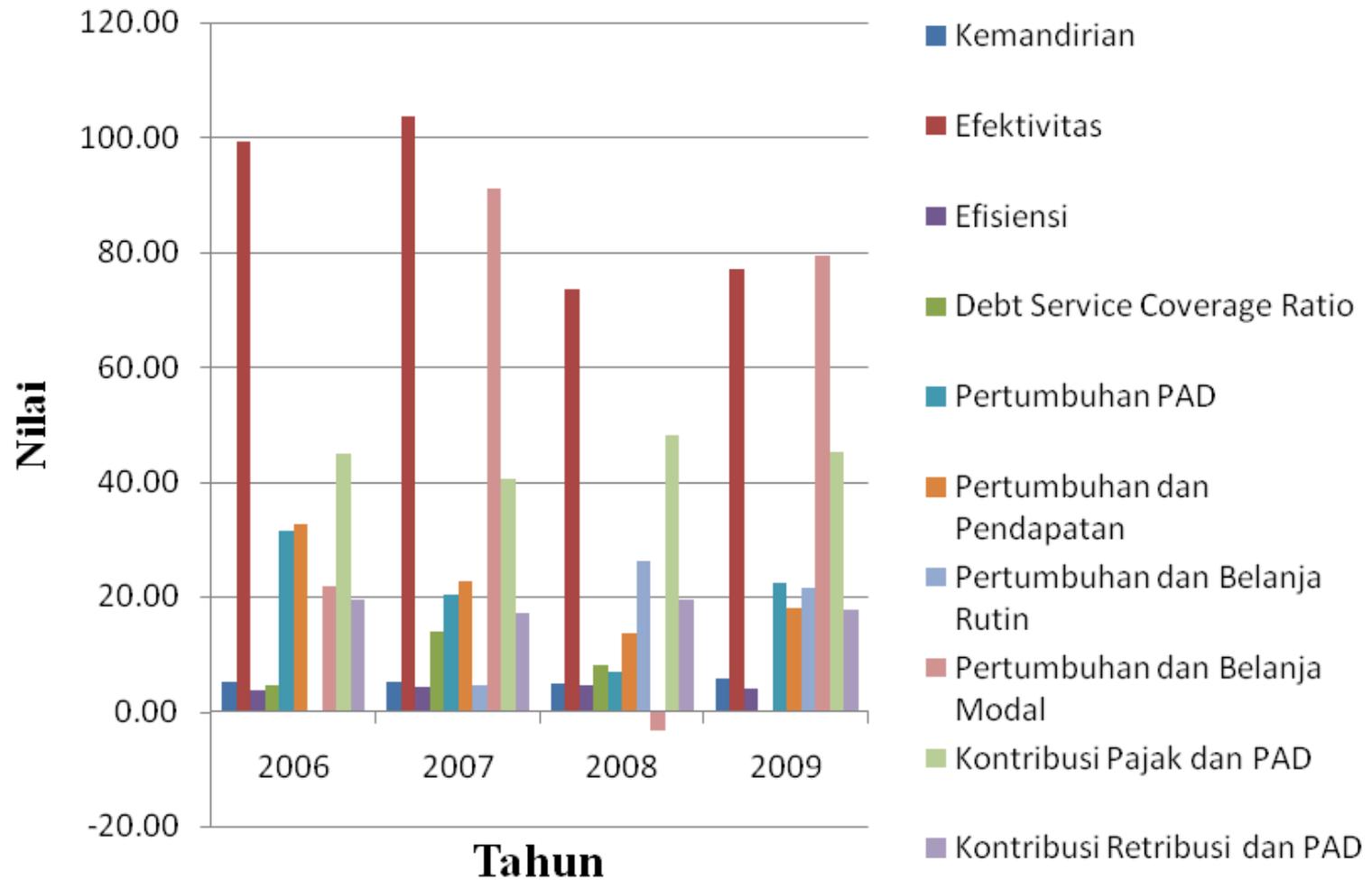
- ▶ Sub bagian anggaran
- ▶ Sub bagian perbendaharaan
- ▶ Sub bagian akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

c. Analisis Data dan Pembahasan

Hasil Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun 2006-2009

Rasio	Tahun				Rata-rata
	2006	2007	2008	2009	
Kemandirian	5,18%	5,08%	4,80%	5,60%	5,17%
Efektivitas	99,38%	103,76%	73,50%	77,00%	88,41%
Efisiensi	3,81%	4,16%	4,68%	4,08%	4,18%
Debt Service Coverage Ratio	4,54%	13,98%	8,17%	-	6,67%
Pertumbuhan PAD	31,31%	20,21%	6,92%	22,41%	20,21%
Pertumbuhan dan Pendapatan	32,52%	22,59%	13,47%	18,09%	21,67%
Pertumbuhan dan Belanja Rutin	0,29%	4,67%	26,17%	21,38%	19,17%
Pertumbuhan dan Belanja Modal	21,87%	91,13%	-3,25%	79,47%	47,31%
Kontribusi Pajak dan PAD	44,91%	40,58%	48,17%	45,21%	44,72%
Kontribusi Retribusi dan PAD	19,56%	17,12%	19,41%	17,76%	18,46%

Grafik Perhitungan Rasio



C. Pembahasan

- ▶ Dari data diatas rasio kemandirian Kota Batu pada tahun 2007 dan 2008 mengalami penurunan sebesar 0,10% dan 0,28%, sehingga ketergantungan daerah pada pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) mulai berkurang dan perlu di pertahankan. Sebaliknya pada tahun 2009 rasio kemandirian Kota Batu peningkatan sebesar 1,20%, sehingga ketergantungan daerah pada pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) mulai ada ketergantungan dan perlu di kurangi secara umum rasio kemandirian Kota Batu telah mandiri.
- ▶ Rasio efektifitas Kota Batu pada tahun 2006 sampai 2009 mengalami fluktuatif pada tahun 2007 rasio efektifitas kota batu mengalami peningkatan 4,38%, sehingga perlu di diefektifkan. Pada tahun 2008 rasio efektifitas Kota Batu mengalami penurunan sebesar 30,26%, Sehingga Kota Batu harus meningkatkan lagi kinerjanya untuk mengefektifkan lagi rasio efektifnya. Pada tahun 2009 rasio efektifitas Kota Batu mengalami peningkatan 3,50% Sehingga Kota Batu telah memperbaiki kinerjanya pada tahun 2009. Menurut Halim, (2007 : 23) kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio efektifitas yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, namun secara umum pemerintah Kota Batu kurang efektif.

lanjutan

- ▶ Hasil Analisis Rasio Efisiensi pada Kota Batu selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 cenderung mengalami kenaikan. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 %. Pada tahun 2007 dan 2008 rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 0,35% dan 0,52%, sehingga rasio efisiensi perlu ditingkatkan. Pada tahun 2009 rasio efisiensi Kota Batu mengalami penurunan sebesar 0,60%, sehingga rasio efisiensi perlu di tingkatkan. Berdasarkan hal tersebut maka kinerja keuangan Pemerintah Kota Batu dapat dikatakan efisien meski mengalami kenaikan, sebab rasio selama tahun 2006 sampai dengan 2009 dibawah 1 (satu) atau 100 %. Dan biaya pemungutan PAD Kota Batu sebesar 5% dari PAD tahun sebelumnya.
- ▶ Rasio *debt service coverage ratio* pada Pemerintah Kota Batu selama tahun 2006 sampai 2009 mengalami fluktuasi naik turun. Pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 9,44 sehingga *debt service coverage ratio* perlu di pertahankan. Pada tahun 2008 Rasio *debt service coverage ratio* pada Pemerintah Kota Batu mengalami penurunan 5,81, sehingga *debt service coverage ratio* perlu di tingkatkan. Pada tahun 2009 Kota Batu tidak melakukan pinjaman sehingga tidak ada pembayaran utang pokok dan Rasio *debt service coverage ratio* tidak ada. Secara umum *debt service coverage ratio* telah baik.

lanjutan

- ▶ Hasil rasio pertumbuhan PAD pada Pemerintah Kota Batu selama tahun 2006 sampai 2009 mengalami fluktuasi naik turun. Hal ini menandakan bahwa Kota Batu belum mampu mempertahankan pertumbuhan PAD kurang stabil. Pada tahun 2007 dan 2008 rasio pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 11,1% dan 13,29% sehingga pertumbuhan PAD perlu ditingkatkan. Pada tahun 2009 rasio pertumbuhan kota batu mengalami peningkatan sebesar 15,49% sehingga pertumbuhan PAD perlu di pertahankan.
- ▶ Hasil rasio pertumbuhan pendapatan pada Pemerintah Kota Batu selama tahun 2006 sampai 2009 mengalami fluktuasi naik turun. Hal ini menandakan bahwa Kota Batu belum mampu mempertahankan pertumbuhan pendapatan kurang stabil. Pada tahun 2007 dan 2008 rasio pertumbuhan pendapatan pada Pemerintah Kota Batu mengalami penurunan sebesar 9,93% dan 9,12%. Sehingga pertumbuhan pendapatan Kota Batu perlu ditingkatkan. Pada tahun 2009 rasio pertumbuhan pendapatan pada Pemerintah Kota Batu mengalami peningkatan sebesar 4,62%. Sehingga pertumbuhan pendapatan Kota Batu perlu dipertahankan.

lanjutan

- ▶ Rasio pertumbuhan dan Belanja rutin Pemerintah Kota Batu selama tahun 2006 sampai 2009 mengalami fluktuasi. Hal ini berarti kondisi yang dialami tidak stabil. Pada tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan sebesar 4,38% dan 26,17%. Sehingga pertumbuhan belanja Kota Batu pada tahun 2007 dan 2008 perlu dikurangi, karena belanja semakin tinggi kurang baik bagi kinerja keuangan. Pada tahun 2009 Rasio pertumbuhan dan Belanja rutin Pemerintah Kota Batu mengalami penurunan sebesar 4,78%.
- ▶ Rasio Pertumbuhan dan Belanja modal Pemerintah kota Batu selama tahun 2006 sampai 2009 mengalami fluktuasi. Hal ini berarti kondisi yang dialami tidak stabil. Karena Pada tahun 2007 peningkatan yang yaitu sebesar 69,26%. Sehingga belanja modal tahun 2007 perlu dikurangi. Pada tahun 2008 Rasio Pertumbuhan dan Belanja modal Pemerintah kota Batu mengalami penurunan yang sangat jauh sebesar 87,88%. Sehingga belanja modal tahun 2008 perlu dipertahankan. Pada tahun 2009 Rasio pertumbuhan dan Belanja modal Pemerintah Kota Batu mengalami peningkatan sebesar 76,22%. Sehingga belanja modal tahun 2009 perlu dipertahankan.

lanjutan

- ▶ Rasio kontribusi pajak dan PAD Pemerintah kota Batu selama tahun 2006 sampai 2009 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 penurunan kontribusi pajak sebesar 40.58%. Sehingga pada tahun 2007 sektor pajak kurang memberikan kontribusi bagi PAD Kota Batu. Pada tahun 2008 Rasio kontribusi pajak dan PAD Pemerintah kota Batu mengalami peningkatan sebesar 7,59%. Sehingga pada tahun 2008 sektor pajak mampu memberikan kontribusi bagi PAD Kota Batu. Pada tahun 2009 Rasio kontribusi pajak dan PAD Pemerintah kota Batu mengalami penurunan sebesar 2,96%. Dan hal ini terulang pada tahun 2007, Sehingga sektor pajak pada tahun 2009 kurang memberikan kontribusi bagi PAD Kota Batu. Dengan demikian pemerintah Kota Batu pada tahun 2006 sampai 2009 kurang optimal untuk merealisasikan pendapatan dan mempertahankan kontribusi pajak bagi PAD
- ▶ Rasio kontribusi retribusi dan PAD Pemerintah kota Batu selama tahun 2006 sampai 2009 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 penurunan kontribusi retribusi sebesar 17.12%. Sehingga pada tahun 2007 sektor retribusi kurang memberikan kontribusi bagi PAD Kota Batu. Pada tahun 2008 Rasio kontribusi Retribusi dan PAD Pemerintah kota Batu mengalami peningkatan sebesar 2,29%. Sehingga pada tahun 2008 sektor retribusi mampu memberikan kontribusi bagi PAD Kota Batu. Pada tahun 2009 Rasio kontribusi retribusi dan PAD Pemerintah kota Batu mengalami penurunan sebesar 1,65%. Sehingga sektor retribusi daerah pada tahun 2009 kurang memberikan kontribusi bagi PAD Kota Batu. Dengan demikian pemerintah Kota Batu pada tahun 2006 dan 2009 kurang optimal untuk merealisasikan pendapatan dan mempertahankan kontribusi retribusi bagi PAD.

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Batu dari tahun 2006–2009 secara umum termasuk dalam kategori baik. Apabila dijabarkan lebih lanjut hasil dari kesimpulan tersebut maka:

1. Pada rasio kemandirian selama 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2007 dan 2008 mengalami penurunan dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan. Hal ini berarti pada tahun 2007 dan 2008 tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) tinggi dan tahun 2009 tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) mulai berkurang, secara umum rasio kemandirian telah baik.
2. Perhitungan rasio efektivitas dari tahun 2006 sampai 2009 mengalami fluktuatif, pada tahun 2007 mengalami peningkatan dan pada tahun 2008 mengalami penurunan serta pada tahun 2009 mengalami peningkatan kembali. Hal ini efektivitas Kota Batu dalam merealisasikan pendapatan di katagorikan kurang baik.

lanjutan

3. Hasil perhitungan rasio efisiensi mengalami selama 2 tahu terakhir mengalami kenaikan pada dan pada tahun 2009 mengalami penurunan, tetapi nilainya di bawah 100%. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien karena biaya pemungutan PAD Kota Batu sebesar 5% dari Realisasi PAD tahun sebelumnya.

4. Hasil perhitungan rasio DSCR mengalami peningkatan dari tahun 2007 dan mengalami penurunan pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009 tidak ada. Dari tahun 2006 sampai 2008 nilai semuanya diatas 2,5. Hal ini berarti bahwa rasio DSCR Kota Batu di katagorikan baik,

5. Rasio pertumbuhan PAD dari tahun 2006 sampai 2009 mengalami fluktuatif. Pada dari tahun 2007 dan 2008 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan. Walaupun PAD nya mengalami kenaikan, tetapi belum optimal. Sehingga Pemerintah Kota Batu belum mampu mempertahankan PAD setiap tahun.

lanjutan

6. Rasio pertumbuhan dan pendapatannya dari tahun 2006 sampai tahun 2009 mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2007 dan 2008 terjadi penurunan sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan. Sehingga Pemerintah Kota Batu belum mampu mempertahankan pendapatan setiap tahun.

7. Rasio pertumbuhan Belanja Rutin dari tahun 2006 sampai 2009 fluktuatif, pada tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan dan pada tahun 2009. Sehingga pemerintah Kota Batu kurang mampu mempertahankan belanja rutin dari tahun ke tahun.

8. Rasio pertumbuhan belanja modal dari tahun 2006 sampai tahun 2009 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 mengalami penurunan dan pada tahun 2009 kembali mengalami peningkatan. Sehingga pemerintah Kota Batu kurang mampu mempertahankan belanja rutin dari tahun ke tahun.

9. Rasio Kontribusi Pajak terhadap PAD dari tahun 2006 sampai tahun 2009 mengalami fluktuatif. Pada tahun tahun 2007 mengalami penurunan dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2009 mengalami penurunan. Sehingga pada tahun 2007 dan 2009 pajak kurang memberikan kontribusi pada PAD sedangkan pada 2008 memberikan kontribusi bagi PAD.

lanjutan

10. Rasio kontribusi retribusi daerah pada PAD dari tahun 2006 sampai tahun 2009 fluktuatif. Pada tahun 2007 mengalami penurunan dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2009 mengalami penurunan kembali sebesar. Sehingga pada tahun 2007 dan 2009 Retribusi daerah Kota Batu kurang memberikan kontribusi bagi PAD dan sebaliknya pada tahun 2008 retribusi daerah memberikan kontribusi bagi PAD.

B. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan dan memerlukan perbaikan serta pengembangan untuk studi-studi selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Periode yang digunakan hanya empat tahun, yaitu tahun 2006–2009, sehingga penelitian ini belum dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah kota Batu secara mendalam.
2. Alat ukur kinerja keuangan yang dipakai hanya rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio *debt service coverage ratio* (DSCR), rasio pertumbuhan (*growth ratio*) dan rasio kontribusi.

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

A. Bagi Instansi :

1. Pemerintah Kota Batu agar selalu mengoptimalkan potensi-potensi yang ada terutama pendapatan asli daerah (PAD).
2. Meningkatkan kinerja seluruh perangkatnya agar dapat mencapai atau melebihi target atau anggaran yang telah ditetapkan dan mampu mempertahankan hasil yang telah dicapai dengan baik.

B. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa diharapkan dapat lebih menyempurnakannya dengan menambah variabel dari rasio keuangan (rasio belanja rutin terhadap APBD dan rasio belanja pembangunan terhadap APBD) dan objek penelitian serta periodanya agar penelitian ini dapat lebih berkembang.